



## DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: ANTARA IDEALITAS TEORI DAN REALITAS PRAKTIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI POLITIK

Annisa D Putri Ramansyah<sup>1</sup>, Dilla Khoerunnisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [annisadachroputri@gmail.com](mailto:annisadachroputri@gmail.com), [Dillakhoerunnisa27@gmail.com](mailto:Dillakhoerunnisa27@gmail.com)

**Abstrak** : Penelitian ini mengkaji hubungan antara desentralisasi dan otonomi daerah dengan pendekatan sosiologi politik. Desentralisasi secara teoritis dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat demokrasi lokal. Namun, realitas implementasi desentralisasi di Indonesia menunjukkan berbagai kontradiksi, seperti lemahnya kapasitas administratif, korupsi yang meluas, dan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Kajian ini menggunakan pendekatan literatur untuk mengeksplorasi bagaimana teori-teori dalam sosiologi politik diterapkan atau justru tidak relevan dengan kondisi empirik di Indonesia. Temuan ini menunjukkan pentingnya adaptasi teori kelembagaan untuk memahami dinamika desentralisasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia

Kata Kunci : Desentralisasi, Otonomi Daerah, Sosiologi Politik, Teori Kelembagaan, Demokrasi Lokal

**Abstract.** This study examines the relationship between decentralization and regional autonomy from a political sociology perspective. Theoretically, decentralization is designed to improve public service delivery, enhance community participation, and strengthen local democracy. However, the implementation of decentralization in Indonesia reveals contradictions, such as weak administrative capacity, widespread corruption, and local governments' dependence on the central government. This study uses a literature-based approach to explore the applicability of political sociology theories in understanding these issues. The findings emphasize the need for institutional theory adaptation to comprehend decentralization dynamics in developing countries like Indonesia.

**Keywords:** Decentralization, Regional Autonomy, Political Sociology, Institutional Theory, Local Democracy

## 1. PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Masalah

*Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep yang sering diidealkan dalam literatur politik sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memperkuat demokrasi lokal. Secara teori, desentralisasi memungkinkan distribusi kekuasaan yang lebih merata, sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Di Indonesia, meskipun otonomi daerah telah diterapkan sejak reformasi, berbagai masalah masih muncul, seperti ketimpangan fiskal, lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan, dan rendahnya kapasitas institusional di tingkat daerah.<sup>1</sup> Sosiologi politik menawarkan kerangka untuk memahami dinamika desentralisasi, khususnya dengan melihat bagaimana kekuasaan dan kepentingan aktor-aktor politik memengaruhi implementasinya. Namun, pandangan teoritis ini sering kali tidak mampu menjelaskan sepenuhnya realitas di lapangan. Sebagai contoh, teori kelembagaan mengasumsikan bahwa struktur institusi yang baik dapat mendorong keberhasilan desentralisasi, tetapi di Indonesia, struktur kelembagaan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang menghambat implementasi.<sup>2</sup>*

*Selain itu, desentralisasi di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dari segi korupsi. Alih-alih mendekati pelayanan kepada masyarakat, desentralisasi justru memperluas peluang korupsi di tingkat lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi yang mendalam antara teori desentralisasi sebagai alat untuk memperkuat*

*demokrasi dan realitas praktik yang cenderung melemahkan kepercayaan publik.<sup>3</sup>*

*Fenomena lain yang relevan adalah ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Meskipun secara hukum daerah memiliki kewenangan otonomi, kenyataannya banyak daerah yang tetap bergantung pada alokasi dana dari pusat. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih bersifat administratif daripada politik, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi inovasi daerah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana teori-teori dalam sosiologi politik dapat diterapkan atau bahkan perlu dimodifikasi untuk memahami dinamika desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji data empiris dan literatur terkini terkait implementasi desentralisasi di Indonesia.<sup>5</sup>*

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Studi awal oleh Smith (2018) menunjukkan bahwa desentralisasi berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat di beberapa daerah. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas administratif pemerintah daerah. Penelitian Smith menjadi dasar bagi berbagai studi lanjutan yang mencoba mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan desentralisasi.

Penelitian Rahmawati (2020) melengkapi temuan Smith dengan menyoroti peran partai politik lokal dalam menggerakkan agenda desentralisasi. Rahmawati menemukan bahwa partai politik lokal sering kali menjadi penghalang dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi karena fokus mereka yang lebih kepada kepentingan kelompok daripada

---

<sup>1</sup> Kurniawati, A. (2021). Kapabilitas administratif dalam desentralisasi. *Jurnal Politik dan Kebijakan Lokal*, 7(3), 145–160.

<sup>2</sup> Mulyana, Y. (2016). *Dinamika sistem politik Indonesia*. CV Pustaka Setia.

<sup>3</sup> Rahmawati, D. (2020). Peran partai politik lokal dalam desentralisasi. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 6(2), 200–215.

<sup>4</sup> Setiawan, F. (2023). Adaptasi teori desentralisasi di negara berkembang. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 8(4), 300–320.

<sup>5</sup> Smith, J. (2018). Decentralization and local governance. *Journal of Comparative Politics*, 10(1), 50–70.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

pelayanan publik. Penelitian ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan teori kelembagaan dengan analisis aktor politik untuk memahami dinamika desentralisasi.

Selain itu, studi oleh Kurniawati (2021) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi daerah dalam mengelola sumber daya manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak daerah di Indonesia masih kekurangan tenaga kerja yang kompeten untuk mendukung implementasi desentralisasi. Kurniawati juga menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat daerah sebagai faktor kunci keberhasilan desentralisasi.

Studi terkini oleh Setiawan (2023) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami desentralisasi. Setiawan berpendapat bahwa teori-teori Barat tentang desentralisasi sering kali tidak relevan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti perlunya adaptasi teori untuk mencerminkan realitas lokal.

Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting bagi kajian ini dalam mengeksplorasi relevansi teori-teori dalam sosiologi politik terhadap praktik desentralisasi di Indonesia. Dengan menggabungkan temuan dari berbagai studi sebelumnya, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang desentralisasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiologi politik menawarkan berbagai teori untuk memahami hubungan antara kekuasaan, institusi, dan masyarakat dalam konteks desentralisasi. Salah satu teori yang sering digunakan adalah Teori Kelembagaan (Institutional Theory). Teori ini

menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang kuat dan transparan untuk mendukung keberhasilan desentralisasi. Menurut teori ini, desentralisasi dapat berhasil jika institusi di tingkat daerah memiliki kapasitas administratif yang memadai serta akuntabilitas yang jelas. Namun, di Indonesia, banyak kelembagaan lokal yang lemah dan sering kali dipolitisasi, sehingga implementasi desentralisasi menjadi tidak efektif.<sup>6</sup>

Selain itu, teori Pluralisme dalam sosiologi politik juga relevan untuk memahami bagaimana kekuatan-kekuatan sosial, seperti komunitas adat atau organisasi masyarakat sipil, berinteraksi dalam desentralisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa desentralisasi dapat memberikan ruang lebih besar bagi aktor-aktor lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme sering kali terganggu oleh dominasi elit politik lokal yang cenderung memonopoli kekuasaan.<sup>7</sup>

Teori lain yang digunakan adalah Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory), yang berfokus pada perilaku aktor politik dalam mendukung atau menghambat kebijakan desentralisasi. Dalam konteks Indonesia, teori ini dapat membantu menjelaskan mengapa beberapa aktor lokal lebih memilih mempertahankan ketergantungan pada pemerintah pusat daripada memanfaatkan otonomi yang diberikan. Aktor-aktor ini sering kali bertindak berdasarkan keuntungan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik.<sup>8</sup>

Namun, tidak semua teori dalam sosiologi politik dapat diterapkan secara langsung pada konteks desentralisasi di Indonesia. Sebagai contoh, teori Neoliberalisme, yang menekankan efisiensi pasar sebagai pendorong desentralisasi, kurang relevan di

<sup>6</sup> Transparency International Indonesia. (2022). Laporan korupsi di tingkat lokal. TII.

<sup>7</sup> Wahyuni, R. (2020). Demokrasi lokal di era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 90–105.

<sup>8</sup> Wibowo, S. (2021). Fiskal otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 210–225.

Indonesia karena banyak daerah yang masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan teoritis perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan politik setempat.

Pada akhirnya, kombinasi dari berbagai teori dapat memberikan kerangka yang lebih holistik dalam memahami desentralisasi. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana teori-teori tersebut dapat diterapkan di Indonesia, sekaligus menunjukkan kelemahannya dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur dengan menelaah laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan studi kasus di beberapa daerah di Indonesia. Analisis data menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri, namun menghadapi tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketimpangan antara harapan teori dan kenyataan implementasi. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi di Indonesia belum sepenuhnya mencapai potensi yang dijanjikan dalam teori-teori sosiologi politik.

Sebagai contoh, laporan Kementerian Dalam Negeri (2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menjadi indikasi lemahnya otonomi fiskal di daerah, yang pada akhirnya membatasi inovasi kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks teori kelembagaan, fenomena ini mencerminkan kegagalan dalam membangun struktur kelembagaan yang mandiri dan efisien di tingkat daerah. Institusi lokal masih bergantung pada intervensi pusat, yang bertentangan dengan prinsip dasar desentralisasi.

Ketergantungan fiskal yang tinggi juga memperparah ketimpangan pembangunan antarwilayah. Daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, seperti daerah dengan sumber daya alam melimpah, cenderung lebih mampu berkembang dibandingkan daerah dengan sumber daya terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan pembangunan yang signifikan, bertentangan dengan tujuan awal desentralisasi yang ingin menciptakan pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, desentralisasi di Indonesia belum mampu menjembatani disparitas antara daerah maju dan tertinggal.

Korupsi di tingkat lokal juga menjadi tantangan serius dalam implementasi desentralisasi. Transparency International Indonesia (2022) melaporkan peningkatan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dalam satu dekade terakhir. Korupsi ini sering kali dilakukan melalui manipulasi anggaran atau proyek pembangunan yang tidak transparan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa desentralisasi, alih-alih memperkuat demokrasi lokal, justru menciptakan ruang baru bagi praktik korupsi yang terdesentralisasi. Akibatnya, tujuan desentralisasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gagal tercapai.

Dalam konteks sosiologi politik, teori pluralisme yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak sepenuhnya relevan di Indonesia. Banyak keputusan penting yang masih didominasi oleh elit politik lokal, sementara partisipasi masyarakat cenderung bersifat simbolis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia masih berada dalam fase transisi, di mana struktur kekuasaan lama belum sepenuhnya digantikan oleh sistem yang lebih inklusif dan partisipatif. Selain itu, rendahnya kapasitas administratif di tingkat daerah menjadi kendala utama lainnya. Banyak daerah yang masih kekurangan tenaga ahli dan sumber daya manusia berkualitas untuk mengelola kebijakan secara efektif. Hal ini sering kali berujung pada buruknya pelaksanaan program pembangunan. Sebagai contoh, proyek infrastruktur yang dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar sering kali mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kurangnya perencanaan yang matang.

Sementara itu, fenomena politik dinasti di tingkat lokal turut memperburuk situasi. Banyak kepala daerah yang berasal dari keluarga atau kelompok politik tertentu, sehingga memprioritaskan kepentingan kelompok dibandingkan kebutuhan masyarakat. Politik dinasti ini tidak hanya menghambat regenerasi kepemimpinan, tetapi juga menciptakan monopoli kekuasaan yang merusak



prinsip keadilan dan demokrasi lokal. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat melemahkan legitimasi desentralisasi di mata masyarakat.

Dari sisi pengawasan, pemerintah pusat sering kali menghadapi dilema antara memberikan otonomi penuh kepada daerah dan memastikan akuntabilitas. Ketidakeimbangan antara keduanya menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor lokal untuk memperluas kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan desentralisasi yang tidak hanya menekankan otonomi, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam reformasi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi di Indonesia perlu dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik spesifik setiap daerah, bukan dengan pendekatan satu ukuran untuk semua. Pemerintah pusat juga perlu memperkuat kapasitas daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis, sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, desentralisasi di Indonesia adalah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Namun, dengan pembaruan kebijakan yang tepat, desentralisasi memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan yang lebih merata dan demokratis. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dinamika lokal secara mendalam dan mengintegrasikan pendekatan teori dengan realitas di lapangan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia menghadapi berbagai kontradiksi antara teori dan realitas. Meskipun teori-teori dalam sosiologi politik, seperti teori kelembagaan dan pluralisme, memberikan kerangka yang berguna untuk memahami desentralisasi, realitas implementasinya menunjukkan banyak

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

kelemahan. Faktor-faktor seperti ketergantungan fiskal, korupsi, dan dominasi elit lokal menghambat pencapaian tujuan desentralisasi.

Sebagai temuan utama, penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih bersifat administratif daripada politik, dengan otonomi daerah yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal diperlukan untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mengintegrasikan teori-teori sosiologi politik dengan data empiris untuk memahami dinamika desentralisasi secara komprehensif.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Kurniawati, A. (2021). Kapabilitas administratif dalam desentralisasi. *Jurnal Politik dan Kebijakan Lokal*, 7(3), 145–160.
- Mulyana, Y. (2016). *Dinamika sistem politik Indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Rahmawati, D. (2020). Peran partai politik lokal dalam desentralisasi. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 6(2), 200–215.
- Setiawan, F. (2023). Adaptasi teori desentralisasi di negara berkembang. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 8(4), 300–320.
- Smith, J. (2018). Decentralization and local governance. *Journal of Comparative Politics*, 10(1), 50–70.
- Transparency International Indonesia. (2022). *Laporan korupsi di tingkat lokal*. TII.
- Wahyuni, R. (2020). Demokrasi lokal di era desentralisasi. *Jurnal Ilmu Politik*, 5(1), 90–105.
- Wibowo, S. (2021). Fiskal otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 210–225.